

**FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN PARTISIPASI
PEMILIH PADA PILGUB
LAMPUNG 2018
(Studi Pada Kecamatan Gading Rejo Dan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu)**

(Skripsi)

**Oleh
RAMA RAMADHON**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PILGUB LAMPUNG 2018 (Studi Pada Kecamatan Gading Rejo Dan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)

Oleh

RAMA RAMADHON

Penelitian partisipasi pemilih ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan partisipasi masyarakat dalam pilgub Lampung di Kabupaten Pringsewu, khususnya pada Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa yang mengalami penurunan partisipasi secara signifikan diantara kecamatan yang ada pada pilgub 2014 ke pilgub 2018. Penyelenggaraan momen pilkada yang di nantikan memberikan harapan kepada penyelenggara pilkada agar masyarakat antusias dalam berpartisipasi, dimana penyelenggara pemilu mengadakan sosialisasi di pasar dan di tempat-tempat lainnya agar masyarakat dapat memberikan hak suaranya dalam pilkada 2018 yang akan diselenggarakan, akan tetapi di daerah Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa sendiri mengalami penurunan pada pilgub 2018 dari pilgub 2014 sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan informan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, masyarakat kecamatan, dan komisioner KPU Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian hasil wawancara diolah oleh peneliti sehingga dapat memperoleh hasil yang relevan dengan beberapa teori yang dikemukakan para ahli. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor penurunan partisipasi masyarakat dalam pilgub di Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa adalah karena beberapa faktor yaitu; pertama adalah kondisi geografis, seperti banyak masyarakat Kecamatan yang keluar daerah untuk bekerja sehingga tidak dapat mengikuti momen pilkada yang diselenggarakan, kedua adalah dikarenakan perbedaan momen pemilu, pemilih sangat dipengaruhi oleh momen pemilihan legislatif yang dikenal memiliki keterikatan emosional secara langsung dengan pemilih, sedangkan pilgub sangat jarang masyarakat memiliki kedekatan emosional dengan kandidat, dan yang ketiga adalah karena adanya politik yang penuh ranah kotor, korup, dan perubutan kursi belaka, hal demikian dapat menyebabkan masyarakat kecewa yang menyebabkan enggan untuk mengikuti pemilihan yang diselenggarakan. Ketiga faktor inilah yang paling dominan menyebabkan angka partisipasi menurun.

Kata Kunci: Partisipasi, Pilkada

ABSTRACT

**FACTORS THAT CAUSED DECREASE IN PARTICIPATION
OF LAMPUNG'S GOVERNOR GENERAL
ELECTION IN 2018
(CASE STUDY IN GADING REJO AND AMBARAWA
SUB-DISTRICT OF PRINGSEWU DISTRICT)**

**BY
RAMA RAMADHON**

This voter participation study aims to determine the factors that can influence the decline in community participation in the Lampung governor election in Pringsewu District, especially in Gading Rejo and Ambarawa Subdistricts which have decreased participation significantly among the sub-districts in the 2014 regional election to the 2018 regional election. The hope is to give hope to the organizers of the elections so that the community will be enthusiastic in participating, where the election organizers hold socialization in the market and in other places so that people can give their voting rights in the 2018 regional election which will be held, but in the Gading Rejo and Ambarawa District decreased in the 2018 election from the previous 2014 gubernatorial election. The research method used was qualitative descriptive with religious leaders, community leaders, youth leaders, sub-district community leaders, and Pringsewu Regency KPU commissioners. This study uses interview techniques and documentation, then the results of interviews are processed by researchers so that they can obtain relevant results with several theories put forward by experts. The results of this study explain that the factor of reducing community participation in the elections in Gading Rejo and Ambarawa Districts is due to several factors, namely; The first is geographical conditions, such as many Sub-Districts who leave the area to work so they cannot attend the moment of regional elections held, second is due to differences in election moments, voters are strongly influenced by the moment of legislative elections which are known to have direct emotional attachment to voters, while the election is very rarely do people have emotional closeness with kandidat, and the third is because of politics that are full of dirty, corrupt, and merely changing seats, this can cause people to be disappointed which causes reluctance to take part in the elections held. These three factors are the most dominant causes of declining participation rates.

Keywords: Participation, Election

**FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN PARTISIPASI
PEMILIH PADA PILGUB
LAMPUNG 2018
(Studi Pada Kecamatan Gading Rejo Dan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu)**

Oleh

RAMA RAMADHON

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

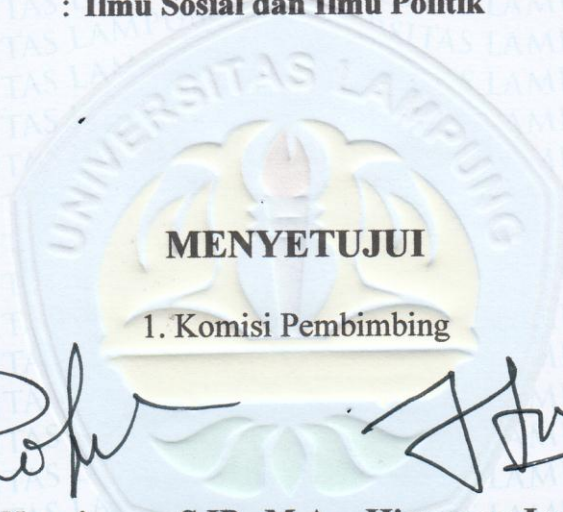
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN
PARTISIPASI PEMILIH PADA PILGUB
LAMPUNG 2018**
(Studi pada Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu)

Nama Mahasiswa : **Rama Ramadhon**

No. Pokok Mahasiswa : **1416021090**


Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. **Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.**
NIP 19780430 200501 1 00 NIP 19830727 200912 1 009

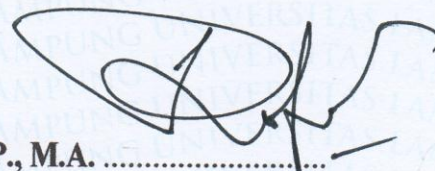
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

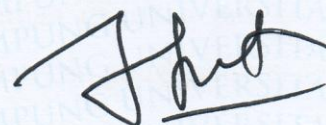
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.**



Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : 22 Mei 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Rama Ramadhon
NPM. 1416021090

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rama Ramadhon dilahirkan di Pardasuka, Pringsewu pada 31 Januari 1996. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara, putra dari Bapak Syahrul dan Ibu Yusniti.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2002-2008 di SDN 2 Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu. Setelah lulus SD penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu Lampung tahun 2008-2011 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA YP UNILA Bandar Lampung tahun 2011-2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2014. Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan program Studi S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya”
(QS Al-Baqarah: 286)

“Jika tidak ada cita-cita dan keinginan mencapai cita-cita, tidak akan
ada kemajuan perikemanusiaan. Tidaklah akan timbul manusia besar,
pribadi besar yang melanjutkan pekerjaan orang terdahulu dan kelak
mewariskan pula orang yang datang kemudian”
(HAMKA)

أعط فرح النفس إل الآخر و إن كان بالتبسم

“Berilah kegembiraan batin kepada orang lain, walaupun dengan
senyuman”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad
Shalallahu'alaihiwassalam Serta Keluarga Dan Para Sahabatnya.

Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

“Ayah Ku Syahrul Ismail Dan Ibu Ku Yusniti ” Terima Kasih Doa Dan Kasih
Yang Tiada Habisnya Serta Setiap Perjuangan Yang Telah Kalian Curahkan
Untuk Seluruh Anak-anaknya. Semoga Karya Ini Dapat Membuat Bangga Dan
Memberikan Kebahagiaan Atas Segala Jerih Dan Payah Yang Telah Dikerjakan

“Teruntuk Kakak-kakak Ku” Terima Kasih Atas Perhatian Dan Dukungan Yang
Kalian Berikan Selama Dalam Perkuliahan Ini

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga Allah Subhaanahuwata'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada
kalian semua

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah Subhaanahuwata'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu'alaihiwassalam sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul "Faktor Penyebab Penurunan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub Lampung 2018 (Studi Pada Kecamatan Gading Rejo Dan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini serta kebaikan yang pernah diberikan kepada penulis, antara lain yaitu:

1. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu tercinta, Syahrul Ismail. dan Yusniti atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir dan tidak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya, Semoga Allah Subhaanahuwata'ala selalu memberikan

perlindungan, kesehatan, kasih sayang, dan surga-Mu serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Ayahanda dan Ibunda tercinta.

2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung serta sebagai pembahas skripsi penulis. Terima kasih atas dedikasinya terhadap jurusan Ilmu Pemerintahan dan kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan serta bimbingan, saran, dan kritik yang membangun selama menjadi pembahas skripsi penulis, yang dengannya penulis dapat memperbaiki skripsi dengan yang lebih baik. Semoga segala kebaikan dari Allah selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
3. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A. selaku pembimbing penulis. Terima kasih ilmu, saran, semangat dan motivasi. Terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis yang bapak berikan. Semoga segala kebaikan dari Allah Subhaanahuwata'ala selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Penulis kagum dengan sikap bapak yang berusaha untuk selalu mengayomi anak-anak bimbingannya dan memberikan semangat kepada mahasiswa bimbingannya.
4. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si. selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas kesabaran untuk meluangkan waktu dalam menghadapi penulis, atas segala bimbingan ilmu, dan saran untuk menghasilkan skripsi yang baik dan benar sehingga atas kebaikan bapak, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dari Allah Subhaanahuwata'ala selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

5. Seluruh dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan dari Allah Subhaanahuwata'ala selalu tercurah untuk bapak dan ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
6. Al-Akh Faisal Ibnu Syarifuddin yang banyak membantu dalam pelaksanaan seminar penulis serta teman karib seperjuangan dalam menaiki dan mencicipi manis pahitnya tangga perkuliahan dari awal hingga akhir, penulis ucapkan barakallahufik semoga Allah memberikan anda keberkahan dimana pun anda berada atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan semoga Allah Subhaanahuwata'ala limpahkan kemudahan dalam penyusunan skripsi yang sedang dijalankan.
7. Saudara Robi, Alek dan Fajar yang banyak membantu penulis dalam menjawab pertanyaan kejanggalan dan ketidak tahuan penulis tentang suatu masalah yang terkait dengan perkuliahan serta bantuan mereka semua dalam penulisan skripsi dan pelaksanaan seminar penulis, penulis ucapkan jazakumullahukhoiron semoga Allah membalas kalian dengan balasan kebaikan.
8. Kawan-kawan angkatan 2014 Adlul, Wahyu Fadli, Indra, Syahrul, Yudi, Rido, Wahyu Syaputra, Ferdian, Armando dan yang sedang berjuang lainnya, maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga dimudahkan segala urusan perkuliahan dan proses kelulusan yang sedang dikerjakan dan terima kasih atas kerbersamaannya tatkala diperkuliahan.

Bandar Lampung, 22 Mei 2019

Rama Ramadhon

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Pemilukada.....	19
B. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik.....	21
1. Pengertian Partisipasi Politik	21
2. Fungsi Partisipasi Politik	23
C. Perilaku Pemilih.....	24
D. Faktor–faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat....	27
E. Kerangka Pikir Penelitian.....	30
III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Fokus Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Data Informan	37
E. Jenis Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Teknik Keabsahan Data	43

IV GAMBARAN UMUM.....	45
A. Gambaran Pilgub Lampung Tahun 2014	45
B. Gambaran Pilgub Lampung Tahun 2018	48
C. Partisipasi Pemilih Di Kabupaten Pringsewu Pada Pilgub 2014 dan 2018	50
D. Kecamatan Gading Rejo	53
E. Kecamatan Ambarawa	56
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Faktor Penurunan Penggunaan Hak Pilih Masyarakat Gading Rejo	61
a. Pemilu Yang Penuh Ranah Kotor, Korup, dan Perebutan Kursi Belaka	62
b. Tingkat Pendidikan	65
c. Masalah Administrasi.....	68
d. Kepercayaan Politik	70
e. Geografis	72
f. Etnis.....	73
g. Perbedaan Momen Pemilu	75
B. Faktor Penurunan Penggunaan Hak Pilih Masyarakat Ambarawa	80
a. Pemilu Yang Penuh Ranah Kotor, Korup, dan Perebutan Kursi Belaka	81
b. Tingkat Pendidikan	83
c. Masalah Administrasi.....	85
d. Kepercayaan Politik	88
e. Geografis	89
f. Etnis.....	91
g. Perbedaan Momen Pemilu	93
C. Analisis Faktor Penurunan Penggunaan Hak Pilih Masyarakat Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa.....	100
a. Faktor Dominan Penyebab Menurunnya Partisipasi Pemilih.....	100
b. Faktor Lain Penyebab Menurunnya Partisipasi Pemilih.....	105
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	112
A. Simpulan.....	112
B. Faktor Yang Mempengaruhi Turunnya Partisipasi Pemilih.....	112
a. Faktor Geografis.....	112
b. Perbedaan Momen Pemilu.....	113
c. Pemilu Yang Penuh Ranah Kotor, Korup, Dan perebutan Kursi Belaka	113
C. Faktor Yang Tidak Mempengaruhi Turunnya Partisipasi Pemilih.....	114
a. Administrasi.....	114
b. Kepercayaan Politik.....	114
c. Pendidikan.....	115

d. Etnis.....	115
D. Saran.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel

	Halaman
1. Daftar Informan.....	38
2. Pasangan Kandidat Pilgub 2014 Serta Partai Pengusung	46
3. Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah 2014 Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.....	47
4. Perolehan Suara Paslon Pada Pilgub Lampung 2014	48
5. Pasangan Kandidat Pilgub 2018 Serta Partai Pengusung	48
6. Hasil Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Tiap Kabupaten/Kota Pada Pilgub Lampung 2018	49
7. Perolehan Suara Paslon Pada Pilgub Lampung 2018	49
8. Partisipasi Pemilih Kabupaten Pringsewu Pada Pilgub 2014 Dan 2018	51
9. Partisipasi Pemilih Per-Kecamatan Kabupaten Pringsewu Pada Pilgub 2014	51
10. Partisipasi Pemilih Per-Kecamatan Kabupaten Pringsewu Pada Pilgub 2018	52
11. Penurun Partisipai Pemilih Di Kecamatan Pringsewu dan Gading Rejo Pada Pilgub 2014 ke Pilgub 2018	52
12. Luas Kecamatan Gading rejo Menurut Penggunaan Tanah 2017.....	54
13. Nama Kepala Pekon dan Masa Jabatan di Kecamatan Gading Rejo 2017	55
14. Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Pekon di Kecamatan Ambarawa, 2017	56
15. Luas Kecamatan Ambarawa menurut Pekon 2017	57
16. Luas Kecamatan Ambarawa Menurut Penggunaan Tanah 2017	58
17. Tabel Nama Kepala Pekon dan Masa Jabatan di Kecamatan Ambarawa 2017	58
18. Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Pekon di Kecamatan Ambarawa 2017	58
19. Analisis Penurunan Partisipasi Pemilih Di Kecamatan Gading Rejo	

Pada Pilgub Lampung 2018	78
20. Analisis Penurunan Partisipasi Pemilih Di Kecamatan Ambarawa Pada Pilgub Lampung 2018	97
21. Triangulasi Faktor Penurunan Partisipasi Pemilih Di Kecamatan Gading Rejo Dan Ambarawa	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Bagan Kerangka Pikir 33

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan asas demokrasi pada suatu negara. Pemilu dan demokrasi adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa lepas dan demokrasi juga tidak lepas dari peran rakyat, seperti yang dikatakan bahwa demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat dapat menentukan sendiri pasangan calon atau kandidat yang dijadikan pejabat eksekutif, dimana pejabat terpilih tersebut dapat menentukan perkembangan kebijakan nantinya, oleh karena itu pemilu merupakan bentuk demokrasi terbesar yang rakyat dapat berpartisipasi didalamnya.

Menurut Herdiyanto (2016:206) pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-

benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Pemilihan umum dalam demokrasi ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum (Bachtiar, 2014:2).

Pemilu sendiri bukanlah tujuan kita berbangsa dan bernegara, akan tetapi pemilu yang diselenggarakan agar menuntukan anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah yang akan memimpin masyarakat dalam mensejahterakan rakyatnya, sebagaimana yang dikatakan Yasa (2018:2) Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi, dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Pemilu yang merupakan hal yang penting di dalam demokrasi bukanlah suatu tujuan demokrasi, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Hakikat tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan.

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) pada negara demokrasi merupakan suatu prosedur yang harus dipenuhi, agar dapat membagi kekuasaan ditingkat daerah. Pilkada juga merupakan sarana untuk melakukan proses pergantian pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya, dan masyarakat memiliki hak untuk melakukan partisipasi politiknya secara bebas tanpa intervensi, tekanan dari pihak manapun. Masyarakat dapat memilih pemimpin yang mereka anggap memiliki kriteria lebih baik dalam kepemimpinannya, lebih mensejahterakan yang dipimpinnya, dan lebih bertanggung jawab dalam mengemban amanah yang rakyat berikan kepadanya.

Para kandidat yang diusung dalam partai politik dalam pilkada dapat memperebutkan jabatan politik secara adil dan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara demokrasi. Perebutan jabatan politik semuanya dilakukan dalam aturan yang jelas, tidak melewati batasan yang telah ditetapkan dari cara-cara yang sudah disepakati dan ditetapkan. Partai politik juga menurut Redjo (2014:68) diuntut untuk mampu memperjuangkan kehendak publik/rakyat. Terkait rekrutmen calon kepala daerah menurut Irham (2016:146) prinsip kesetaraan (*equality*) dalam kandidasi juga harus ditegakkan. Dalam hal ini rekrutmen tersebut harus dilandasi pertimbangan kualitatif (kompetensi dan integritas) dan bukan sekadar pertimbangan pragmatis seberapa besar kapital kandidat.

Tiap warga negara yang sudah terdaftar sebagai pemilih berhak untuk secara bebas memilih calon pilihannya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, dan

begitu juga tiap kandidat yang mencalonkan diri dapat berjuang untuk meyakinkan masyarakat agar dapat memilihnya dengan cara apapun. Para kandidat dapat mempengaruhi melalui kebijakan-kebijakan yang ia akan perjuangkan, kesejahteraan-kesejahteraan yang ia janjikan, atau permasalahan-permasalahan lain pada masyarakat yang belum dapat titik terang untuk dapat diselesaikan.

Pemilihan yang diselenggarakan pada negara demokrasi akan membuka kesempatan kekuasaan yang terbuka luas bagi siapa saja yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk menanggung beban yang diberikan. Pemilihan yang diselenggarakan ini juga tidak dipungkiri memungkinkan munculnya pemimpin-pemimpin dengan gaya politik baru yang diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya.

Salah satu tujuan pengabdian kepala daerah disamping meningkatkan kesejahteraan, dan bertanggung jawab menurut Ali (2003:161) juga dalam rangka menjaga kesatuan wilayah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Calon kepala daerah mendatang harus memiliki komitmen menciptakan *team work* yang mampu menjamin pemerintahan yang mapan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memelihara citra bangsa, khususnya di daerah masing-masing.

Salah satu Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah adalah terlegitimasi oleh undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Pilkada). Pengisian keterwakilan pemimpin disuatu daerah melazimkan adanya pelaksanaan pilkada agar tercapainya kepemimpinan di tingkat lokal. Pada Undang-undang ini nampak jelas bahwa Undang-undang mengatur tentang pemilu, baik pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota.

Penyelenggaraan pemilu sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, pada Pasal 2 bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu merupakan bentuk terpenting dalam realisasi demokrasi suatu negara. Semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu menunjukkan keberhasilan atas upaya yang dilakukan aparat pemerintah dalam menjalankan demokrasi.

Perwujudan demokrasi di tingkat lokal salah satunya adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau yang sering disebut Pemilihan Gubernur (pilgub). Masyarakat mendapatkan kesempatan dan kedaulatan untuk memberikan suara bagi pasangan calon, dimana pilkada ini diselenggarakan secara langsung dan bebas tanpa intervensi pihak manapun yang merupakan salah satu perwujudan kebebasan hak dalam memilih. Tingginya partisipasi politik masyarakat dalam memilih anggota eksekutif merupakan hal yang diidamkan oleh penyelenggara pemilu, karena dengan tingginya partisipasi politik disuatu daerah akan berdampak tingginya nilai demokrasi di daerah tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam memilih pejabat publik juga merupakan suatu kontrol oleh publik dalam menentukan kesejahteraannya dengan kebijakan-kebijakan yang diusung oleh pejabat publik tersebut. Partisipasi politik juga merupakan wujud pemenuhan hak-hak bagi warga negara yang dilakukan oleh pemerintah, karena sudah menjadi hal yang wajar pada negara yang memakai sistem demokrasi untuk dapat memenuhi hak-hak warga negaranya dalam menentukan pilihannya sendiri.

Pemilukada juga merupakan bagian penataan kekuasaan secara terstruktur agar terjadinya *check and balance* pada lembaga-lembaga dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, dan menghasilkan pemimpin yang mempunyai kapasitas kepemimpinan yang lebih baik dari sebelumnya. Kristiadi dalam Amirudin (2006:1) mengatakan “Sebagai proses dari transformasi politik, makna Pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *checks and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar Pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang lebih akuntabel, berkualitas, legitimit, aspiratif, dan peka terhadap kepentingan masyarakat”.

Masyarakat didalam negara demokrasi memiliki peranan yang penting dalam pemilu. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dengan ikut andilnya dalam pemilu merupakan indikasi pembangunan politik yang meningkat, karena ia mengetahui bahwa pemimpin yang mempunyai kewenangan di wilayahnya nanti

akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat kesejahteraan atau sebaliknya.

Tingginya partisipasi masyarakat didalam struktur negara demokrasi merupakan ciri bahwa kehidupan politik yang meningkat di dalam negara demokrasi tersebut, sebagaimana selaras apa yang dikatan oleh Hendratno (2009:281) bahwa pemilihan umum merupakan salah satu tolak ukur untuk menggambarkan tinggi rendahnya derajat kehidupan demokrasi berbangsa dan bernegara.

Masyarakat harus mempunyai pandangan yang luas dalam hal berpartisipasi, dimana masyarakat dapat menentukan kandidat yang lebih baik dalam kepemimpinannya agar kandidat yang terpilih adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab dalam mengemban amanah yang diberikan dan lebih membawa kemaslahatan bagi kerukunan agama dan masyarakat, jika tidak diperhatikan menyebabkan mereka akan apatis dalam pemilu dan salah menentukan pilihan dalam pemilu yang diselenggarakan.

Umpanya ada dua pasangan kandidat yang dimana masing-masing mempunyai karakter yang berbeda, kandidat yang pertama adalah orang yang baik, dan kandidat yang kedua adalah orang yang jahat. Apabila mayoritas masyarakat sudah mengetahui karakter kedua kandidat masing-masing, maka masyarakat secara spontan akan sadar dimana pemimpin yang akan mensejahterakan serta mendatangkan kemaslahatan bagi kerukunan beragama dan bangsa, akan tetapi mayoritas masyarakat cenderung apatis dengan hal pemilihan yang diselenggarakan tersebut atau tidak selektif dalam memilih pasangan kandidat.

Hal tersebut akan mungkin menyebabkan terjadinya kemenangan oleh kandidat yang berwatak jahat tersebut dengan memobilisasi masyarakat melalui tim suksesnya dengan sedikit uang yang diberikan kepada masyarakat. Kesadaran politik yang kurang pada masyarakat dan tidak ada pendirian iman yang kuat di dalam dirinya maka ia dengan senang menerima secercah uang yang berujung pada penyesalan yang berkepanjangan dalam kepemimpinan penguasa tersebut.

Selayaknya bagi kita menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan memilih calon yang mempunyai kapasitas yang akuntabel demi kemaslahatan kerukunan beragama dan masyarakat yang didapatkan dari pemimpin yang terpilih, dan mengadakan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak terperosok kedalam kesalahan memilih kandidat, karena hal tersebut berkaitan dengan perkembangan kebijakan yang nantinya akan direalisasikan pemerintah kepada masyarakat.

Adanya hak rakyat dalam berpartisipasi dalam politik menuntut pemerintah berusaha menunaikan hak-hak warga negara melalui pemilu ini agar mereka dapat berpartisipasi dalam penunaian hak yang diberikan, karena memilih dalam pemilu adalah hak bukan suatu kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017, adapun di negara Australia mereka mewajibkan warga negaranya ikut turut berpartisipasi dalam pemilu. Jika tidak ikut berpartisipasi mereka akan mendapatkan sanksi oleh pemerintah .

Warga negara yang ingin berpartisipasi dalam pemilu harus memiliki beberapa syarat, antara lain terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bagi warga

negara yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), atau bisa juga lewat Rukun Warga (RW) di desanya masing-masing.

Provinsi Lampung sendiri telah melakukan pilgub pada tahun 2014 dan pilkada serentak pada tahun 2018. Pilkada serentak tersebut diikuti oleh 17 provinsi di Indonesia. Pada pilgub 2014 provinsi Lampung diikuti oleh 14 kabupaten/kota dan pada pilgub 2018 diikuti oleh 15 kabupaten/kota. 14 kabupaten yang mengikuti pilgub tersebut yaitu Bandar Lampung, Metro, Tanggamus, Pringsewu, Way Kanan, Mesuji, Pesawaran, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, ini semua berjumlah 14 kabupaten dan ditambah satu kabupaten lagi pada pilgub 2018 yakni Pesisir Barat.¹ KPU Lampung dalam pleno DPT menetapkan daftar pemilih untuk pilgub 2014 diputuskan berjumlah 5.868.304 mata pilih, dan pada pilgub 2018 DPT berjumlah 5.887.152 mata pilih.²

Persoalan partisipasi merupakan hal yang krusial dalam negara demokrasi, karena menyangkut terhadap legitimasi pejabat eksekutif, dimana legitimasi kekuasaan menurut Syafii (2010:92) bahwa bila seorang pimpinan menduduki jabatan tertentu atau memiliki kekuasaan adalah bila yang bersangkutan melalui pengangkatan sehingga dianggap absah dalam menjalankan kekuasaannya atau sesuai hukum. Masyarakat yang tidak berpartisipasi harus menerima kekuasaan

¹ sumber: KPU Provinsi Lampung 2014 & 2018

² sumber: -<http://lampung.tribunnews.com/2014/01/13/dpt-pilgub-lampung-5868304-mata-pilih> dan <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/rekap/t1/lampung>

yang legal ini walaupun mereka tidak ikut andil dalam pilkada yang diselenggarakan.

Partisipasi masyarakat juga bisa menjadi ukuran masyarakat atas kepercayaan terhadap demokrasi, yang dimana asas utama demokrasi adalah pemilu. Partisipasi masyarakat yang kurang dalam menunaikan haknya karena tingkat keikutsertaan masyarakat dalam demokrasi menurun sebagai warga negara yang ikut andil berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini diperkirakan karena masyarakat yang apatis dalam pemilu. Para pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah juga memiliki berbagai alasan dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilihan.

Pemilih yang tidak dapat mengikuti momen pemilu dapat disebabkan karena kesibukan pekerjaan, sedang bekerja diluar kota yang menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan, ada juga yang berasumsi memilih atau tidak memilih kepala daerah tidak ada perubahan dalam pembangunan, sehingga ia enggan untuk memilih kepala daerah yang diselenggarakan, dimana pilkada ini dilakukan secara langsung di daerah tempat asalnya yang dia sendiri tidak sedang berada di daerah tersebut lantaran kerja atau rasa kekecewaan terhadap pemimpin yang silih berganti tidak menimbulkan perubahan yang besar bagi masyarakat dan alasan-alasan yang lainnya.

Berbagai macam alasan-alasan yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, secara sadar atau tidak sadar

bahwa pemenang dari paslon tersebut akan memimpin wilayahnya dalam waktu 5 tahun kedepan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti ini. Berikut penelitian terdahulu yang telah diuraikan:

1. Fitri Wulan Sundari, JOM FISIP Vol. 4 No. 1 - Februari 2017 hal 1-15 dengan judul “Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2015”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang dialami oleh masyarakat sehingga menimbulkan sikap apatis, dimana masyarakat tidak peduli atau masa bodoh dengan kegiatan penyelenggaraan pilkada di daerahnya, sikap ini timbul karena ikut maupun tidak dalam pilkada menurut masyarakat tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari. faktor administrasi, faktor pekerjaan, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan mempengaruhi partisipasi yang mengakibatkan masyarakat tidak menggunakan hak politik.
2. Doni Hendrik , Jurnal Demokrasi Vol. IX No. 2 Th. 2010 hal 137-148 dengan judul “Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008”.

Kota Padang yang semula diharapkan mendapat dukungan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dan berkualitas ini, malah pada kenyataannya hanya menunjukkan angka 51% saja yang berpartisipasi ikut mencoblos dalam pilkada. Faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat kota Padang dalam Pilkada Kota Padang tahun 2008 ialah disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan cenderung lemahnya kesadaran politik warga kota Padang. Alasan yang lainnya karena tidak disosialisasikan, karena tidak terdaftar dalam DPT, serta tidak mau peduli dengan Pilkada.

3. Elwy Soehandry. S, JOM FISIP Vol. 4 No.1 – Februari 2017 hal 1-14 Dengan Judul “Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum DI Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2015”. Masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi fluktuasi partisipasi pemilih di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada pemilihan umum tahun 2010- 2015. Hasil Penelitian ini di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi, persoalan administrasi dan teknis pemilihan juga merupakan permasalahan yang harus diperhatikan. Seperti yang terjadi pada beberapa pemilihan umum yang ada di kecamatan tersebut, masih ada masyarakat yang tidak dapat Kartu Pemilih yang digunakan untuk melakukan pemilihan di TPS. Lemahnya pendataan dari petugas setempat dan juga masalah data yang tidak valid, catatan penting yang perlu diungkap lebih jauh bahwa ternyata perilaku tidak memilih di

Kecamatan Tebing Tinggi tidak disebabkan bahwa sistem pemilihan yang tidak demokratis atau tidak mempresentasikan kepentingan mereka.

Faktor yang mempengaruhi fluktuasi yakni ; Pertama, Kondisi Sosiologis. Kondisi ini melihat beberapa aspek terkait sosiologis pemilih yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu faktor sosial ekonomi, faktor geografis, dan etnis. Kedua, Kondisi Psikologis. Kondisi psikologis merupakan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap dalam menjelaskan perilaku memilih.

Pada kondisi ini melihat ketertarikan dan kecenderungan pemilih dalam menentukan pilihannya. Instrumen dari kondisinya ini dapat dilihat dari kepercayaan politik yang terdiri dari kepercayaan terhadap isu dan kepercayaan terhadap kandidat dan kesadaran politik dari pemilih yang dilihat dari partisipasi otonom dan mobilisasi. Ketiga, Pilihan Rasional. Dalam pilihan rasional, pemilih diasumsikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup

4. Siti Muslimah Skripsi jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila dengan judul “Evaluasi Strategi Penyelenggara Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah 2015 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Way Kanan”. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan proses strategi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di pemilihan kepala daerah 2015 Way Kanan dan untuk menganalisis kendala dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dipemilihan kepala daerah 2015 Way Kanan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Strategi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum kepala daerah 2015 terkategori sebagai strategi success yang merupakan hasil yang paling diidamkan-idamkan oleh setiap organisasi. Situasi ini dapat terjadi jika formulasi strategi perusahaan disusun dengan baik begitu juga dalam implementasinya.

Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan meliputi (1) Membentuk relawan demokrasi, (2) KPU goes to school, (3) PEMILOS (pemilihan langsung osis), (4) PERSAMI (Perkemahan Pramuka Sabtu Malam Minggu). Faktor hambatannya adalah Jumlah pemilih pemula yang selalu bertambah setiap tahunnya.

5. Elis Anisah Fitriah. Jurnal Ilmiah Psikologi Juni 2014, Vol. 1, No.2, Hal : 244 – 254 dengan judul “Personal Values dan Internal Political Efficacy Terhadap Patisipasi Politik Mahasiswa Pemilih Pemula Studi pada Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Adab dan Humaniora, serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarkah kontribusi relatif dari nilai personal (*personal values*) dan efikasi internal politik (*internal political efficacy*) terhadap partisipasi politik mahasiswa pemilih pemula di UIN Sunan Gunung Djati.

Hasil penelitian Personal values dan internal *political efficacy* secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik

mahasiswa pemilih pemula, mayoritas responden di empat fakultas yang menjadi subyek penelitian menunjukkan tingkat *personal values*, *internal political efficacy* dan partisipasi politik yang tinggi

6. Ahclak Asmara Yasa, skripsi dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (studi terhadap pemilih pemula di Kel Batang Kaluku Kec Somba Opu Kab Gowa)”. Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pemilih pemula dalam pelaksanaan pilkada serentak di selenggarakan pada tahun 2015 khususnya di Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015.

Hasil penelitian bahwa partisipasi politik masyakat pemilih pemula di kelurahan Batang Kaluku sudah sangat baik (aktif) yang dapat dilihat dari tingginya keinginan masyarakat pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan pilkada, dengan harapan sosok pemimpin yang terpilih nantinya dapat membawa daerah mereka lebih baik lagi.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015. adalah kurangnya pemahaman politik serta proses penyampaian informasi mengenai politik merupakan salah satu factor penghambat bagi masyarakat pemilih pemula. Serta minimnya Pendidikan politik yang di berikan pemerintah yang bersangkutan terhadap pemilih pemula agar dapat melibatkan pemilih pemula secara efektif yang akan

memperkuat dan mempermudah partai politik dan penyelenggara pemilu pada langkah tindak selanjutnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat banyak hal yang menyebabkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu, seperti kurangnya pemahaman politik, kurangnya informasi mengenai politik, minimnya pendidikan politik, faktor administrasi, serta sikap apatis, dimana masyarakat tidak peduli atau masa bodoh dengan pilkada, sikap ini timbul karena ikut maupun tidak dalam pilkada menurut masyarakat tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari.

Kondisi inilah yang menyebabkan penulis mengadakan penelitian, dikarenakan Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa merupakan Kecamatan yang faktor pendidikannya relatif tinggi karena banyaknya fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai kedua Kecamatan tersebut, serta penyampaian informasi mengenai politik mudah didapatkan.

Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa pun pembangunannya bisa di katakan lumayan lancar, dimana perluasan urbanisasi serta jaringan pendidikan, meningkatnya komunikasi masa seharusnya menggerakkan banyak kelompok yang tadinya apatis untuk aktif dalam proses politik. Berdasarkan perbedaan inilah penulis ingin meneliti tentang faktor penurunan partisipasi pemilih di Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu bagi negara demokrasi adalah suatu yang sangat penting. Kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pemilu tentunya

suatu yang sangat diharapkan bagi sistem demokrasi, jadi partisipasi masyarakat yang tinggi merupakan faktor tingginya kesadaran politik dalam konteks demokrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Menganalisa Faktor-faktor Yang Menyebabkan Turunnya Partisipasi Pemilih Pada Pilgub Lampung 2018 di Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah Mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Turunnya Partisipasi Pemilih Pada Pilgub Lampung 2018 Dalam Aspek Partisipasi Pemilih di Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bidang politik dalam Akademik mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan hak pilih masyarakat dalam pemilu.

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan sebuah gambaran mengenai sebuah faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dan memberikan pengetahuan kepada publik bahwa partisipasi merupakan hak bagi setiap warga negara sesuai ketentuan Undang-undang yang dapat dimanfaatkan oleh publik dalam menggunakan hak pilihnya, guna memilih pemimpin yang lebih bertanggung jawab dan mensejahterakan masyarakat.

II. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) menurut Sinaga (2013:34) adalah sebagai media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam negara modern. Sinaga (2013:34) menyebutkan juga bahwa pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Akan tetapi pemilu saja tidak menjadi demokrasi, karena demokrasi memerlukan dari sekedar pemilu namun demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilu. Pemilu bukan hanya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara kedalam proses politik saja, melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintah. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah sistem pemilihan umum.

Adanya pemilu juga dianggap menjalankan fungsi legitimasi, sebagaimana yang dikatakan Sitepu (2012:138) menjalankan fungsi legitimasi maksudnya adalah membina dukungan publik bagi regim atau sistem politik dan kepatuhan terhadap kebijakan serta regulasi lembaga-lembaga negara. Salah satu relevansi dari pemilu adalah pilkada, dimana pilkada ini merupakan salah satu gambaran proses demokrasi dalam menentukan pemimpin yang bakal

menjalankan kepemimpinannya kurun waktu lima tahun mendatang di tingkat lokal. Pilkada ini pun merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dalam legitimasi kepemimpinan pada suatu daerah lokal.

Kepala daerah yang terpilih nantinya bertugas untuk memimpin masyarakat demi menggerakkan roda pemerintahan yang ada, sebagaimana yang dikatakan Hadiawan (2009:637) kepala daerah adalah jabatan publik dan jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat.

Kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya, sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik; yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu rakyat dan pada pilkada merupakan rekrutmen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah.

Pilkada yang diselenggarakan diharapkan akan adanya pemimpin yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya.

B. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Masyarakat yang pada umumnya memiliki pendidikan ia akan sadar akan hak dan kedaulatan yang dimilikinya salah satunya keterlibatan dalam hal politiknya bagi kepentingan tanah air dan bangsanya. Agustino (2007:58) partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi, asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Selanjutnya menurut Surbakti (2007:142) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori, yakni; Apatis, Spectator, dan Gladiator. Apatis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Spectator artinya orang yang tidak pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Gladiator artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

Dari perspektif ilmu politik, warga negara yang ikut dalam partisipasi politik merupakan bentuk tindakan politik, dimana mereka bukan politikus dengan ikutnya berpartisipasi dalam pemilu yang diselenggarakan merupakan

keikutsertaan mereka dalam politik sebagai warga negara yang merupakan sinyal tinggi rendahnya demokrasi yang berjalan. Menurut Ramli (2013:321) tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Sebagian masyarakat yang memiliki peran dalam politik ia terkadang acuh, tidak bersungguh-sungguh dalam partisipasi politik sebagai peserta pemilu, yang demikian itu adalah khalayak yang sering ditemui pada warga negara yang memiliki hak dan kedaulatan dalam partisipasi politik, padahal partisipasi masyarakat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Sebagaimana yang dikatakan Budiarjo (2013:367) bahwa kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Berdasarkan penjelasan ini maka tindakan partisipasi seseorang secara sadar atau tidak sadar merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah.

Fenomena golput juga sering kita temukan di negeri ini dimana perilaku pemilih bersifat apatis dalam pemilu yang diselenggarakan, dengan demikian menyebabkan tidak tercapainya target pemilih yang diharapkan oleh

pemerintah. Pada umumnya kehadiran golput dalam setiap pemilihan umum di Indonesia menurut Arifin (2014:104) memiliki ciri yang relatif sama, yaitu merupakan bentuk apatis dan kritis dikalangan calon pemilih serta sekaligus dapat merupakan bentuk protes kepada rezim yang berkuasa. Arifin memasukkan juga golput ke dalam kelompok “partisipasi kegiatan protes” atau “partisipasi kritis”.

2. Fungsi Partisipasi Politik

Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi antara lain, menurut Efriza (2012:188) dalam studinya mengenai keterlibatan politik, menemukan empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu yaitu:

- a) Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
- b) Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
- c) Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
- d) Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

Dalam persektif berbeda, Sastroatmojo (1995:18) memandang tiga fungsi partisipasi politik sebagai berikut:

- a). Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik.
- b). Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
- c). Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik.

Berdasarkan dua gagasan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah sebagai sarana untuk mengejar sebuah kebutuhan ekonomi, sebagai suatu sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan yang bersifat sosial, serta memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik. Fungsi partisipasi juga berkaitan dengan keterlibatan warga negara dalam memberikan dukungan atau evaluasi dalam memberikan pilihannya terhadap pasangan calon yang menurut dia akan memberikan keuntungan dimasa kepemimpinan yang kelak jika terpilih.

C. Perilaku Pemilih

Pendekatan perilaku dalam studi politik telah melahirkan sejumlah karya tentang tipe dan perilaku para pemilih yang merupakan individu-individu yang memiliki daya seleksi (Arifin, 20014:82). Selanjutnya menurut Nimmo dalam Arifin (2014:82-83) mengemukakan empat tipe dalam pemberian suara dalam pemilihan umum, yaitu; (1) tipe rasional, (2) tipe reaktif, (3) tipe responsife, (4) tipe aktif. Penjelasan keempat tipe tersebut disajikan berdasarkan pemaparan Nimmo sebagai berikut:

Tipe Rasional adalah pemberian suara yang rasional, yang sesungguhnya merupakan aksional diri, yaitu sikap yang intrinsik pada setiap karakter personal pemberi suara yang turut memutuskan pemberian suara kepada kebanyakan warga negara. Orang yang rasional: (1) selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif, (2) memilih alternatif secara sadar, (3) menyusun

beberapa opsi dengan cara transitif, (4) selalu memilih opsi yang peringkat preferensinya paling tinggi, dan (5) selalu mengambil putusan yang sama bilamana dihadapkan kepada opsi-opsi yang sama.

Pemberi suara rasional berminat secara aktif terhadap politik berdiskusi dan mencari informasi politik, serta bertindak berdasarkan prinsip yang tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan umum. Demikian juga pemberi suara rasional mampu bertindak secara konsisten dalam menghadapi tekanan dan kekuatan politik.

Tipe reaktif adalah pemberi suara yang memiliki ketertarikan emosional dengan partai politik. Ikatan emosional kepada partai sebagai identifikasi partai, yakni sebagai sumber utama aksi diri dan suara yang reaktif. Identifikasi dengan partai meningkatkan citra yang lebih menguntungkan tentang catatan dan pengalamannya, kemampuan dan atribut personalnya. Dengan demikian, identifikasi dengan partai meningkatkan tabir perseptual sehingga individu dapat melihat keuntungan bagi orientasi kepartaiannya. Semakin kuat ikatan partai itu, semakin dibesar-besarkan proses seleksi dan distorsi persepsinya.

Tipe responsif adalah pemberi suara yang mudah berubah dengan mengikuti waktu, peristiwa politik, dan kondisi-kondisi sesaat. Meskipun memiliki kesetiaan kepada partai, tetapi afiliasi itu ternyata tidak memengaruhi perilakunya dalam pemberian suara. Hubungan dengan partai politik lebih rasional ketimbang emosional. Pemberi suara yang responsif lebih dipengaruhi oleh faktor jangka pendek, terutama kepentingan dalam pemilihan umum

panjang kepada kelompok tertentu, dibanding oleh kesetiaan atau kepada partai politik. Jadi tipe responsif bersifat situasional.

Tipe aktif adalah pemberi suara yang terlibat aktif dalam menafsirkan personalitas, peristiwa, isu, dan partai politik, dengan menetapkan dan menyusun maupun menerima, serangkaian pilihan yang diberikan. Para pemberi suara merumuskan citra politik tentang apa yang diperhitungkan oleh mereka dengan berbagai varian.

Selanjutnya perilaku masyarakat yang tidak aktif dalam berpartisipasi dalam politik bisa disebabkan rasa kekecewaan dan hanya mementingkan individu belaka sebagaimana keadaan yang terjadi sekarang, karena memandang politik sebagai ranah yang tabu dan kotor, penuh dengan hujatan, korup, dan perebutan kursi kekuasaan belaka.

Persoalan biaya yang dikeluarkan para calon kandidat pun menjadi suatu hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dimana biaya yang dikeluarkan oleh kandidat calon yang terpilih bukanlah biaya yang direlakan begitu saja, tentu saja di dalam benak pikiran masyarakat bahwa kandidat yang terpilih akan berusaha mengembalikan biaya politik yang ia keluarkan sewaktu kampanye dan berusaha juga untuk memberikan bayaran kepada jasa-jasa para pendukungnya. suasana inilah yang disebut Jurdi (2014:85) dapat mendorong gejala depolitisasi menjadi permanen, dan akan menjauhkan masyarakat dari partisipasi politik.

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat menurut Huntington (1994:16&18) adalah faktor sosial ekonomi, status sosial ekonomi meliputi:

1. Tingkat pendapatan

Besarnya tingkat pendapatan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta.

2. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap partisipasinya dalam pemilu.

3. Pekerjaan.

Saat Pemilihan berlangsung masyarakat yang bekerja disektor informal tidak dapat mengikuti pemilihan, karena penghasilan tergantung dengan bekerja atau tidaknya. Seperti buruh harian, nelayan, petani harian yang terdaftar di DPT tidak dapat mengikuti.

Soehandry (2017:8-12) mengemukakan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik, diantara bagian faktor penelitiannya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan politik

Sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap partisipasinya dalam pemilu. Misalnya saja masyarakat yang berpendidikan rendah ada yang tidak mau memilih karena ia menganggap pemilu tidak ada hubungannya dengan kehidupannya. Bahkan pemilu tidak mendatangkan efek terhadap keberlangsungan hidupnya.

3. Geografis

Banyaknya masyarakat Kecamatan yang migrasi keluar daerah untuk bekerja, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bahkan ada juga yang ikut keluarga. Kondisi ini juga menjadi pemicu masalah rendahnya partisipasi.

4. Etnis

Pengaruh etnis juga mempengaruhi pilihan seseorang dalam memilih, hal ini dikarenakan seseorang akan memilih yang berasal dari ras mereka sendiri. Pilihan ini dilatari keterikatan kesukuan yang begitu kuat dalam diri seseorang.

5. Perbedaan Momen Pemilu

Partisipasi pemilih sangat dipengaruhi oleh momen pemilihan legislative yang dikenal memiliki keterikatan emosional secara langsung dengan pemilih, sedikit banyak akan menarik pemilih untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya.

6. Masalah Administrasi dan Teknis Pemilihan

Lemahnya pendataan dari petugas setempat dan juga masalah data yang tidak valid sehingga masyarakat merasa dirugikan karena hak politiknya harus terbuang sia-sia karena mereka menganggap jika tidak memiliki kartu pemilih berarti mereka tidak terdata sebagai pemilih dan mereka pun menjadi malas untuk datang ke TPS.

Kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang berkurang juga dapat disebabkan karena rasa kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat, dimana rasa kekecewaan ini menimbulkan sikap anti politik. Menurut Jurdi (2014:85) kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap politik pilkada mulai berubah ketika mendagri gagal memperjuangkan konsep calon independent pilkada. Partisipasi politik semakin menurun bersamaan dengan menguatnya issue bahwa yang tidak menghendaki adanya “pintu independent” adalah para aktivis partai. Praktik aktor politik yang semacam ini dapat menciptakan apolitik bagi masyarakat. Sikap anti politik dan melihat politik sebagai ranah yang tabu dan kotor, penuh dengan hujatan, korup, dan perubatan kursi belaka, menjalar pada pemikiran masyarakat adalah akibat paling buruk.

Arifin (2014:96) juga mengemukakan bahwa adanya kecenderungan meningkatnya golput (yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu) karena “kekecewaan” (disillusionment) banyak kalangan terhadap “reformasi” dan demokrasi yang jauh dari harapan. Kekecewaan itu semakin meningkat, karena masyarakat yang datang kebilik suara karena digerakan (dimobilisasi)

oleh kandidat melalui para tim suksesnya dengan cara intimidasi atau memberikan hadiah sarung, baju koko, sembako, uang dan bentuk lainnya. sehingga masyarakat kecewa dengan pilkada yang diselenggarakan dengan keadaan yang demikian.

E. Kerangka Pikir Penelitian

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan salah satu tolak ukur akan kemajuan suatu sistem demokrasi. Partisipasi politik merupakan masalah yang penting bagi negara demokrasi. Dari berbagai penelitian tentang partisipasi di berbagai daerah di Indonesia, permasalahan yang paling dominan pada tingkat partisipasi politik antara lain faktor pekerjaan, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lemahnya kesadaran politik, persoalan administrasi, faktor yang lainnya karena masyarakat sedang tidak berada dilokasi pemilihan, bekerja diluar daerah, dan adanya yang tidak terdata sebagai pemilih.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan melihat faktor penurunan partisipasi masyarakat Kecamatan Ambarawa dan Gading Rejo pada pilgub 2014 dan 2018 dengan menggunakan teori yang diantaranya dikemukakan oleh Jurdi (2014:85) bahwa partisipasi pemilih dapat menurun karena melihat politik sebagai ranah yang tabu dan kotor, penuh dengan hujatan, korup, dan perubatan kursi belaka. Penulis juga melihat faktor penurunan partisipasi pemilih yang disampaikan oleh Soehandry dalam penelitiannya (2017:8-12) mengemukakan faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi partisipasi politik, diantara penelitiannya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan politik

Sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap partisipasinya dalam pemilu. Misalnya saja masyarakat yang berpendidikan rendah ada yang tidak mau memilih karena ia menganggap pemilu tidak ada hubungannya dengan kehidupannya. Bahkan pemilu tidak mendatangkan efek terhadap keberlangsungan hidupnya.

3. Geografis

Banyaknya masyarakat Kecamatan yang migrasi keluar daerah untuk bekerja, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bahkan ada juga yang ikut keluarga. Kondisi ini juga menjadi pemicu masalah rendahnya partisipasi.

4. Etnis

Pengaruh etnis juga mempengaruhi pilihan seseorang dalam memilih, hal ini dikarenakan seseorang akan memilih yang berasal dari ras mereka sendiri. Pilihan ini dilatari keterikatan kesukuan yang begitu kuat dalam diri seseorang.

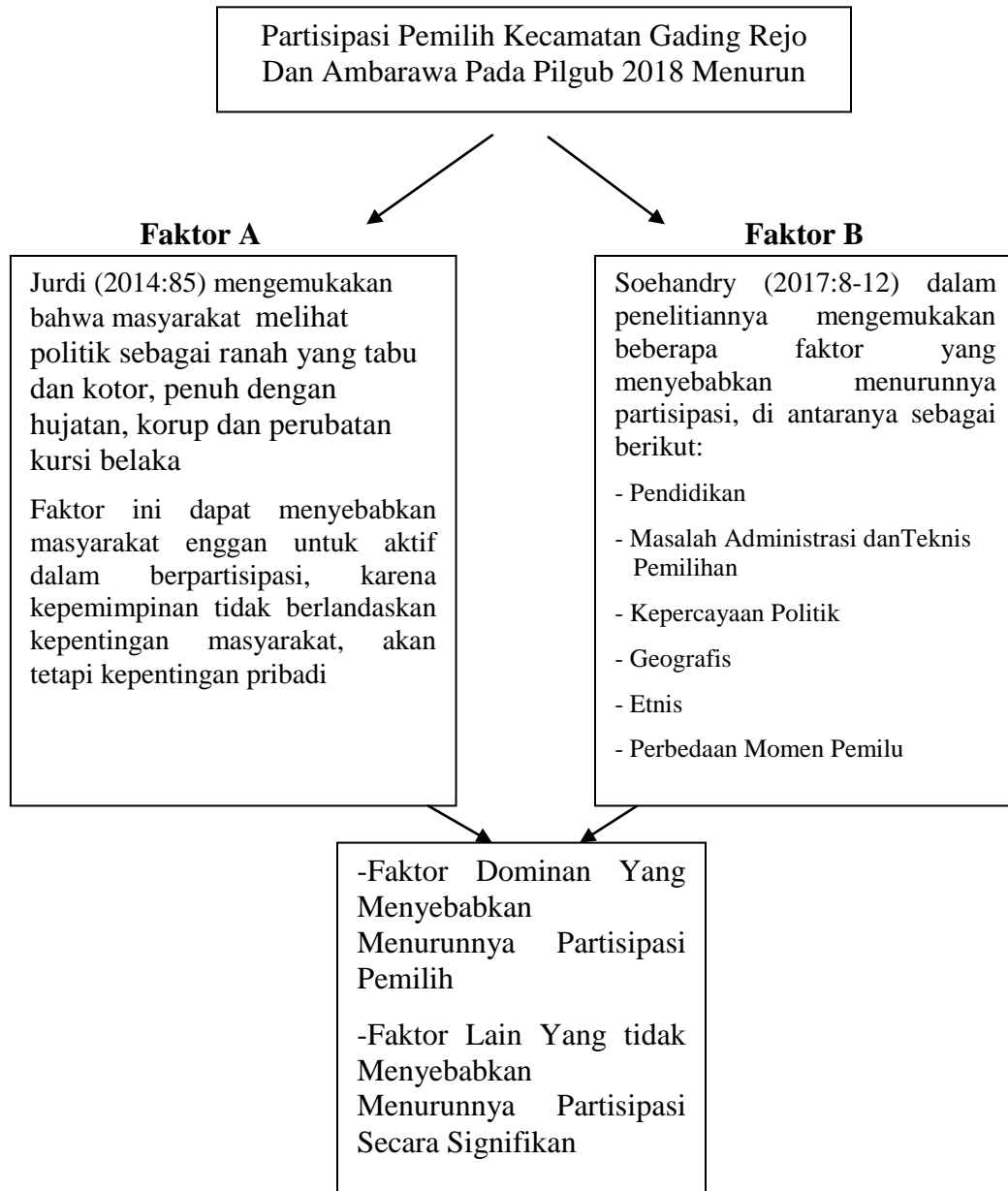
5. Perbedaan Momen Pemilu

Partisipasi pemilih sangat dipengaruhi oleh momen pemilihan legislative yang dikenal memiliki keterikatan emosional secara langsung dengan pemilih, sedikit banyak akan menarik pemilih untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya.

6. Masalah Administrasi dan Teknis Pemilihan

Lemahnya pendataan dari petugas setempat dan juga masalah data yang tidak valid sehingga masyarakat merasa dirugikan karena hak politiknya harus terbuang sia-sia, karena mereka menganggap jika tidak memiliki Kartu Pemilih berarti mereka tidak terdata sebagai pemilih dan mereka pun menjadi malas untuk datang ke TPS.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

Fokus dari bab ini adalah untuk menentukan tipe penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan teknik penarikan kesimpulan data kemudian dibahas dan didukung dengan referensi metode penelitian dalam politik dan pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut maka bab ini dapat menentukan bagaimana cara mengevaluasi permasalahan yang sedang diteliti.

Raco (2010:5) mengemukakan penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Raco (2010:5) juga mengatakan secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara teoritis maupun praktis. Intinya penelitian adalah kegiatan yang terorganisir untuk mendapatkan jawaban atas suatu masalah.

A. Tipe Penelitian

Penulis pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif-kualitatif. Nawawi (2001:63) menyatakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/ obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Sangadji dan Sopiah (2010:21) mengemukakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain. Penelitian Deskriptif yang dikemukakan Sangadji dan Sopiah (2010:21) penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat faktual, untuk mengetahui nilai variabel, dan menggambar suatu masalah yang bersifat fakta sesuai dengan objek yang diteliti.

Sarwono (2006:193) mengatakan bahwa penelitian kualitatif di definisikan sebagai suatu proses yang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif pada penelitian ini dapat memberikan gambaran secara deskriptif tentang data yang didapatkan dari lokasi penelitian dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan

dari informan yang diteliti. Penulis memakai penelitian kualitatif karena ada keutamaan yang tersendiri. Sarwono (2006:195) mengatakan juga bahwa penelitian kualitatif digunakan jika yang bersangkutan ingin melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memahami makna yang melandasi tingkah laku partisipan.
- b. Mendeskripsikan latar dan interaksi partisipan.
- c. Melakukan eksplorasi untuk mengidentifikasi informasi baru.
- d. Memahami keadaan yang terbatas dan ingin mengetahui secara mendalam dan rinci.
- e. Mendeskripsikan fenomena untuk menciptakan teori baru.
- f. Memfokuskan pada interaksi manusia dan proses yang mereka gunakan.

B. Fokus penelitian

Moleong (2006:63) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan, agar tidak dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik. Fokus penelitian adalah untuk membatasi penelitian dan studi yang dilakukan, karena jika tanpa adanya fokus penelitian, maka penelitian akan melebar ke arah yang lebih luas, yakni banyaknya data yang harus diperoleh jika tidak ada fokus penelitian, akibatnya akan menumpuk volume data yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini berfokus kepada faktor-faktor penurunan penggunaan hak pilih masyarakat pada pilgub 2014 dan 2018, dimana pada pilgub 2018 mengalami penurunan dalam partisipasi penggunaan hak pilih pada Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa. Partisipasi yang menurun dari pada sebelumnya merupakan hal yang dapat diteliti agar seluruh kecamatan seluruh Provinsi Lampung dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan partisipasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di wilayah Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa. Penulis memilih Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa karena tingkat partisipasi pemilih masyarakat pada pilgub 2018 di daerah Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa mengalami penurunan dibandingkan partisipasi pemilih pada pilgub 2014. Alasan tersebut mendorong penulis untuk memfokuskan penelitian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi menurunnya tingkat partisipasi hak pilih masyarakat Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa.

D. Data Informan

Informan dalam penelitian ini meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, masyarakat, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisioner KPUD Kabupaten Pringsewu. Berikut merupakan daftar informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Informan	Jumlah Informan	
		Ambarawa	GadingRejo
1	Tokoh Agama	1 (Muhammad Abu Bakar)	1 (Sobri Dinal Mustofa)
2	Tokoh Pemuda	1 (DwiYanto)	1 (Syamsul Bahri)
3	Tokoh Masyarakat	1 (Agus Kholik)	1 (Daim Abdul Jami')
4	Masyarakat	4 (Khamin, Kuncoro, Turisman,	4 (Alhuda, Haji Main, Sutijo,
5	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1 (Yudi Andrian)	1 (Sukardiyono)
6	Komisioner KPUD Pringsewu	1 (Andoyo)	
	Jumlah	17	

Berdasarkan tabel daftar informan diatas bahwa informan dalam penelitian ini adalah 6 Informan dengan jumlah seluruhnya adalah 17 orang. Peneliti mengolah data berdasarkan wawancara langsung dengan informan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan turunnya partisipasi pemilih pilgub Lampung 2018 dalam aspek partisipasi pemilih di Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa.

E. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer.

Sarwono (2006:209) mengatakan data primer merupakan data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisioner KPUD Kabupaten Pringsewu.

b. Data sekunder

Sarwono (2006:209) mengatakan data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan peneliti sebagai penunjang sumber utama, dan dapat juga dari data-data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen yang didapatkan melalui KPU Provinsi, KPUD Kabupaten Pringsewu, berita, jurnal, dan literatur yang terkait dengan penelitian. Adapun data yang diperoleh dari KPUD Pringsewu meliputi dokumen; DA KWK PILGUB 2014, DB-1 KWK PILGUB 2014, MODEL DA, DA1 PRINGSEWU 2018 dan MODEL DB-1KWK PILGUB 2018.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, dibutuhkan teknik cara untuk mengumpulkannya. Pengumpulan data adalah sesuatu yang sangat penting, akan tetapi tidak hanya mencukupkan hanya dengan mengumpulkannya saja, perlu adanya penganalisaan data yang di dapatkan. Adapun teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, kadang-kadang ia perlu memerhatikan sendiri berbagai fenomena, atau kadang-kadang menggunakan pengamatan orang lain. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud untuk menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya (Emzir 2014:37-38).

Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut. Bagi pelaksana atau petugas atau disebut sebagai *observer* bertugas melihat obyek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam moment-moment tertentu dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan (Subagyo, 2006:63).

2. Wawancara

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. Peneliti dapat menemukan bahwa teknik wawancara pribadi merupakan instrumen yang paling baik untuk memperoleh informasi. Dalam berbagai hal peneliti menyadari pentingnya pendapat dan mendengar suara dan perkataan orang tentang topik penelitian, wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang pertanyaan terbuka (Emzir 2014:49-50).

Subagyo (2006:39) mengatakan wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewers* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Posisi sebagai responden dalam wawancara dapat berbentuk satu orang tunggal atau dua orang atau lebih yang disebut kelompok

Penelitian ini menggunakan wawancara dengan melalui proses wawancara terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait hambatan penggunaan hak pilih masyarakat, sehingga keterangan dan informasi yang diberikan dapat ditemukan dengan lebih baik.

G. Teknik Analisi Data

Setelah seluruh data dari lapangan terkumpul, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, adapun tahapan- tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan Kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2014:247).

2. Penyajian Data

Penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk *teks naratif*. Dalam penyajian data berbentuk sekumpulan informasi yang tersusun dalam *life history* sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dilaksanakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan secara naratif sesuai dengan pemaparan yang ditampilkan dalam pembahasan hasil penelitian (Matthew B Miles dan A. Michael Huber 1992:17).

3. Menarik Kesimpulan (Verifikasi)

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan, sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab- akibat atau proposisi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2014:252).

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dari partisipasi masyarakat dalam pilgub lampung 2014 dan 2018 di Kabupaten Pringsewu, studi kasus pada Kecamatan Pringsewu dan Gading Rejo, kemudian ditarik kesimpulan atas faktor-faktor penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilgub, setelah itu kemudian di verifikasi.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah teknik pengkajian ulang yang dilakukan oleh peneliti dari perolehan data-data yang didapat. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data Moelong (2006:327&333) yang terdapat empat bagian yaitu ,1) Perpanjangan Keikutsertaan, 2) Ketekunan Pengamat, 3) Triangulasi, 4)

Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi. Peneliti hanya mengambil dua bagian yakni ketekunan pengamat dan triangulasi. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan perpanjangan keikutsertaan tidak peneliti pakai, karena peneliti tidak berdiskusi bersama teman sejawat dan tidak pula tinggal dilapangan penelitian sampai pengumpulan data tercapai. Penjabaran dari teknik keabsahan data yang peneliti ambil dari Moelong serta penjelasannya sebagai berikut:

a. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamat bermaksud menemukan suatu ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan-persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan itu menyediakan kadalaman.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber, metode penyelidikan dan teori.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Pilgub Lampung Tahun 2014

Partisipasi pemilih dalam pilkada merupakan hal yang sering dibahas oleh komisi penyelenggara pemilu, yang demikian terjadi karena pentingnya partisipasi pemilih dapat menjadi penilaian dalam berjalannya sistem demokrasi di negara. Berjalannya tahun ke-tahun semakin banyak didapati orang-orang yang ingin memangkui jabatan kepala daerah tersebut guna menjalankan pemerintahan lebih maju dan lebih sejahtera ungkapnya. Pembangunan-pembangun daerah provinsi didapati perubahan dari kepemimpinan sebelumnya, yakni perubahan infrastruktur maupun pelayan publik yang lebih memudahkan rakyat, ataupun sebaliknya bahwa pergantian kepemimpinan tidak membawa perubahan yang signifikan untuk rakyat akan tetapi kecewaan yang didapat karena kesalahan jabatan publik oleh pemangku jabatan.

Provinsi Lampung mengadakan kontestasi pilgub pada tahun 2014 dan 2018, kontestasi pilgub 2014 diikuti oleh 14 kabupaten dan pilgub 2018 diikuti oleh 15 Kabupaten. Pilgub Lampung 2014 diikuti oleh 4 kandidat pasangan calon (paslon). dan pada pilgub 2018 juga sama diikuti oleh 4 kandidat paslon. Para

paslon kandidat pilgub 2014 didukung dari beberapa partai politik, sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Pasangan Kandidat Pilgub 2014 Serta Partai Pengusung

No	Kandidat	Partai Pengusung
1	Berlian Tihang-Mukhlis Basri	PDIP, PPP, PKPI, PKB, PKPI, dan PPPI
2	Ridho Ficardo-Bachtiar Basri	Partai Demokrat, PKS, PBB, PKPB, PDK, PKNU, Partai Buruh, dan PDS
3	Herman HN –Zainudin Hasan	PAN, Gerindra, PBR, Partai Pelopor, PMB, PIS, PPRN, BARNAS, dan 9 Partai non parlemen
4	Alzier Dianis Thabranie-Lukman Hakim	Golkar dan Hanura

(sumber: KPU Provinsi Lampung 2014 diolah oleh peneliti pada tahun 2018)

Para Kandidat pilgub ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, Berlian tihang merupakan sekretaris daerah (sekda) Provinsi Lampung (2011-2016) maju bersama bupati Lampung Barat (2012-2017) Mukhlis Basri. Ridho Ficardo mantan ketua DPD partai Demokrat Lampung maju bersama Bachtiar Basri bupati Tulang Bawang Barat (2011-2016). Walikota Herman H.N maju bersama Zainudin Hasan seorang pengusaha dan juga adik dari menteri kehutanan Republik Indonesia (2009-2014) Zulkifli Hasan, dan Alzier Dianis Thabranie ketua DPD I partai golkar maju bersama Lukman Hakim walikota Metro (2005-2014). Adapun hasil Rekapitulasi pilgub 2014 per kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah 2014 Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Pemilih Paslon Cagub dan Cawagub				Jumlah
		Berlian Tihang-Mukhlis Basri	Ridho Ficardo-Bachtiar Basri	Herman HN – Zainudin Hasan	Alzier Dianis Thabranie-Lukman Hakim	
1	Bandar Lampung	65,440	99,548	243,368	25,509	433,865
2	Metro	10,403	32,120	21,586	14,400	78,598
3	Lampung Selatan	56,946	192,273	188,283	29702	467,204
4	Lampung Tengah	73,331	303,976	207,916	38,575	623,798
5	Lampung Utara	42,750	169,701	91,986	14,090	318,527
6	Lampung Timur	63,685	248,741	154,919	30,296	497,641
7	Pringsewu	25,466	104,655	55,317	15,895	201,333
8	Pesawaran	30,160	91,122	61,059	42,720	225,061
9	Tanggamus	48,997	135,715	87,133	25,544	297,389
10	Way Kanan	27,792	116,003	74,386	13,449	231,610
11	Tulang Bawang	19,985	97,315	66,389	10,701	194,390
12	Tulang Bawang Barat	24,894	85,409	29,006	8,050	147,359
13	Mesuji	14,931	56,697	23,634	8,120	103,382
14	Lampung Barat	101,786	83,258	37,801	11,132	233,977
Jumlah Suara Sah		14.96%	44.81%	33.12%	7.11%	100%

(sumber: Rekapitulasi Hasil Pilgub 2014 KPU Provinsi Lampung diolah oleh peneliti pada tahun 2018)

Tabel 4.3 Perolehan Suara Paslon Pada Pilgub 2014

No	Pasangan Kandidat	Presentase
1	Berlian Tihang dan Mukhlis Basri	14,96%
2	Ridho Ficardho dan Bachtiar Basri	44,81%
3	Herman HN dan Zainudin Hasan	33,12%
4	Alzier Dianis Thabranie dan Lukman Hakim	7,11%

(Sumber: KPU Provinsi Lampung diolah oleh peneliti)

Perolehan hasil suara dimenangkan oleh Ridho Ficardho dan Bachtiar Basri dengan 44,81% perolehan suara. Herman HN dan Zainudin Hasan menempati posisi kedua dengan presentase 33,12%, sedangkan pasangan Berlian Tihang dan Mukhlis Basri menempati posisi ketiga dengan presentase 14,96%, dan pasangan Alzier Dianis Thabranie dan Lukman Hakim menempati posisi keempat dengan presentase 7,11%.

B. Gambaran Pilgub Lampung Tahun 2018

Pada pilgub 2018 Provinsi Lampung juga diikuti oleh 4 paslon, dan didukung beberapa partai, sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Pasangan Kandidat Pilgub 2018 Serta Partai Pengusung

No	Kandidat	Partai Pengusung
1	M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri	Demokrat, PPP, Gerindra
2	Herman HN-Sutono	PDI-P
3	Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim	Golkar, PKB, PAN
4	Mustafa-Ahmad jajuli	Nasdem, PKS, Hanura

(sumber: KPU Provinsi Lampung diolah oleh peneliti pada tahun 2018)

Tabel 4.5 Hasil Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Tiap Kabupaten/Kota Pada Pilgub Lampung 2018

No	Kabupaten/Kota	DPT	Pemilih	Presentase
1	Bandar Lampung	656.894	455.975	69,4%
2	Metro	112.118	77.133	68,8%
3	Lampung Barat	205.505	148.576	72,3%
4	Lampung Selatan	708.605	494.043	69,7%
5	Lampung Tengah	912.810	664.883	72,8%
6	Lampung Timur	764.933	523.674	68,5%
7	Lampung Utara	436.457	329.292	75,4%
8	Mesuji	144.571	100.538	69,5%
9	Pesawaran	323,629	235,811	72,9%
10	Pesisir Barat	105.994	73.102	69,0%
11	Pringsewu	291.034	213.115	73,2%
12	Tanggamus	452.733	315.388	69,7%
13	Tulang Bawang	256.158	169,846	66,3%
14	Tulang Bawang Barat	191.008	149.418	78,2%
15	Way Kanan	324.703	228.611	70,4%

(sumber: *Info Pemilu.go.id Pilkada 2018* diolah oleh peneliti pada tahun 2018)

Tabel 4.6 Perolehan Suara Paslon Pada Pilgub Lampung 2018

No	Kandidat	Suara	%
1	M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri	1.043.666	25,46%
2	Herman HN-Sutono	1.054.646	25,73%
3	Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim	1.548.506	37,78%
4	Mustafa-Ahmad Jajuli	452.454	11,04%

(sumber: *Info.Pemilu.go.id Pilkada 2018* diolah oleh peneliti pada tahun 2018)

Para kandidat paslon kepala daerah ini memiliki latar belakang yang berbeda. Para kandidat pada pilgub 2018 yakni Gubernur Lampung M Ridho Ficardo maju bersama Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri diusung oleh Demokrat, Gerindra, PPP . Walikota Herman HN maju bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Periode 2017 Sutono, dan diusung partai PDI-P. Arinal Djunaidi

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Periode 2014–2015 maju bersama Chusnunia Chalim Bupati Lampung Timur Periode 2016–2021 dan diudung partai Golkar, PKB, dan PAN. Mustafa maju bersama Ahmad Jajuli diusung oleh partai Nasdem, PKS, Hanura.

Perolehan hasil suara dimenangkan oleh pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim dengan hasil 37,78% perolehan suara. Herman dan Sutono menempati posisi kedua dengan presentase 25,73%, pasangan M Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri menempati posisi ketiga dengan presentase 25,46%, dan pasangan Mustafa dan Ahmad Jajuli 11,04%.

C. Partisipasi Pemilih Di Kabupaten Pringsewu Pada Pilgub 2014 dan 2018

Tingkat partisipasi pilgub 2014 di Kabupaten Pringsewu adalah sekitar 72,9% dan tingkat partisipasi pada pilgub 2018 adalah sekitar 73,22% . Berdasarkan kedua tabel tersebut DPT pilgub 2014 adalah 314.553, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 160.355 jiwa dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 154.198 jiwa. DPT pilgub 2018 berjumlah 291.034 pemilih, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 149.569 jiwa dan pemilih perempuan sebanyak 141.465. Pada tabel ini pula menginformasikan bahwa terjadinya penurunan DPT pada pilgub 2014 ke 2018. Adapun partisipasi pemilih pada pilgub 2014-2018 pada Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Partisipasi Pemilih Kabupaten Pringsewu Pada Pilgub 2014 Dan 2018

PILGUB	Jumlah Pemilih Laki-laki	Jumlah Pemilih Perempuan	Jumlah Pemilih Laki-laki dan Perempuan	Pemilih	Presentase
PILGUB 2014	160.355	154.198	314.553	229.440	72,9%
PILGUB 2018	149.569	141,465	291.034	213.115	73,2%

(sumber: KPUD Kabupaten Pringsewu diolah oleh peneliti pada tahun 2018)

Pilgub 2014 dan 2018 ini masing-masing diselenggarakan di sembilan Kecamatan Pringsewu, angka presentasi pada pilgub 2014 dan 2018 antara lain ada pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Partisipasi Pemilih Per-Kecamatan Kabupaten Pringsewu Pada Pilgub 2014

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Pemilih	Presentase
1	Pringsewu	45.187	27.829	72,2%
2	Gading Rejo	50.363	38.802	81,33%
3	Ambarawa	19.798	13.225	75,07%
4	Pardasuka	19.848	9.130	64,93%
5	Pagelaran	28.961	17.165	71,05%
6	Pagelaran Utara	7.882	4.430	69,54%
7	Banyumas	11.474	6.711	70,92%
8	Adi Luwih	19.899	12.871	73,89%
9	Sukaharjo	26.028	14.104	68,58%

(Sumber: KPUD Kabupaten Pringsewu 2014)

Tabel 4.9 Partisipasi Pemilih Per-Kecamatan Kabupaten Pringsewu Pada Pilgub 2018

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Pemilih	Presentase
1	Pringsewu	56.167	25.144	74,78%
2	Gading Rejo	56.700	42.183	74,39%
3	Ambarawa	26.281	19.220	73,13%
4	Pardasuka	26.097	18.161	69%
5	Pagelaran	37.852	27.787	73,4%
6	Pagelaran Utara	10.882	7.619	70%
7	Banyumas	15.565	11.556	74,2%
8	Adi Luwih	26.552	19.446	73,2%
9	Sukaharjo	35.008	25.114	71,8%

(sumber: KPUD Kabupaten Pringsewu 2018)

Pada kedua tabel di atas menginformasikan bahwa tingkat partisipasi yang meningkat pada kecamatan Pardasuka, Pringsewu, Pagelaran, Pagelaran Utara, Banyumas, Sukaharjo. Penurunan partisipasi terdapat pada Kecamatan Ambarawa, Adi Luwih dan Gading Rejo, penurunan yang paling besar adalah Gading Rejo dan Ambarawa.

Tabel 4.10 Penurun Partisipai Pemilih Di Kecamatan Pringsewu dan Gading Rejo Pada Pilgub 2014 ke Pilgub 2018

No	Kecamatan	Pilgub 2014	Pilgub 2018	Presentase penurunan
1	Gading Rejo	81,33%	74,39%	6,94%
2	Ambarawa	75,07%	73,13%	1,94%

Penurunan yang terbesar ada di kecamatan Gading Rejo yang pada pilgub 2014 partisipasi masyarakat mencapai 81,33% persen dan pada pilgub 2018 menurun menjadi 74,39 % persen. Penurunan partisipasi pemilih pada kecamatan Gading Rejo sekitar 6,94% persen, padahal Kecamatan Gading Rejo merupakan daerah

yang mana informasi mengenai pemilu dan pendidikannya dinilai tinggi. Penurunan tingkat partisipasi selanjutnya ada pada Kecamatan Ambarawa yang menurun sekitar 1,94%.

Berdasarkan informasi yang ada di tabel ini penulis melakukan penelitian faktor-faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi pemilih dalam pilgub Lampung 2014 ke pilgub 2018 pada dua Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, yakni Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa. Pilkada yang sudah berjalan lancar diselenggarakan terdapat beberapa aspek yang menjadi bahan evaluasi, salah satu evaluasinya adalah tingkat partisipasi pemilih yang menurun pada Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa pada pilgub 2014 ke 2018.

D. Kecamatan Gading Rejo

Gading Rejo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pringsewu, Lampung, Indonesia. Dengan ibukota kecamatan Berjarak kira-kira 10 km ke arah timur Kota Pringsewu dan 35 km ke arah barat Kota Bandar Lampung. Wilayah ini terdiri atas 23 pekon dengan penghasilan utama dari pertanian. Penduduknya sebagian besar berasal dari Jawa, maka banyak ditemukan pekon yang merupakan nama kota/kabupaten di Jawa seperti Blitarejo (Blitar), Kediri (Kediri), Tulung Agung (Tulungagung), Wonosari (Wonosari, Gunung Kidul), dan Yogyakarta (Yogyakarta).

Adapun batas Wilayah Kecamatan Gading Rejo sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lima Kabupaten Pesawaran Barat berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran.

Adapun luas Kecamatan, nama kepala pekon serta penduduk dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.11 Luas Kecamatan Gadingrejo Menurut Penggunaan Tanah 2017

No	Penggunaan Tanah	Luas(Ha)	Presentase
1	Persawahan	3 527	41.15
2	Ladang/Tegalan	1 143	13.34
3	Perkebunan Rakyat	228	2.66
4	Hutan Rakyat	-	-
5	Kolam	1 142	13.32
6	Lahan Bukan Pertanian	2 531	29.53
Jumlah		8 571	100.00

(Sumber : BP3K Kecamatan Gading Rejo Diolah Oleh Peneliti)

Tabel 4.12 Nama Kepala Pekon dan Masa Jabatan di Kecamatan Gadingrejo 2017

No	Pekon	Nama Kepala Pekon	Masa Jabatan
1	Parerejo	Heri Rohim	2017-2018
2	Biltarejo	Maryanto	2016-2022
3	Panjerejo	Wartoyo	2013-2019
4	Bulukarto	Supomo	2013-2019
5	Wates	Irwan Kristina	2016-2022
6	Bulurejo Wates	Suherman	2013-2019
7	Tambah Rejo	Chairul Anwar	2012-2018
8	Wonodadi	Priyono	2016-2022
9	Gading Rejo	Gunawan W Cahyono	2013-2019
10	Tegal Sari	Suharo	2012-2018
11	Tulung Agung	Amin Mutakin	2012-2018
12	Jogjakarta	Daryanto	2018-2018
13	Kediri	Subandi	2016-2022
14	Mataram	Wagino	2012-2018
15	Wonosari	Rusmiyanto	2013-2019
16	Klaten	Ngadik	2012-2018
17	Wates Timur	Suheri	2013-2019
18	Wates Selatan	Irhamzah	2013-2019
19	Gading Rejo Timur	Mirad Septiando	2016-2019
20	Gading Rejo Utara	M. Imron Sahid	2013-2019
21	Tambah Rejo Barat	Catur Hadi Pramono	2013-2019
22	Jogjakarta Selatan	Mursidi	2013-2019
23	Wonodadi Utara	M. Arif Fauzi	2013-2019

(Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Gading Rejo Diolah Oleh Peneliti)

Tabel 4.13 Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Pekon di Kecamatan Ambarawa, 2017

No	Pekon	Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
1	Parerejo	4 308	6.38	675
2	Biltarejo	3 003	6.25	480
3	Panjerejo	2 261	2.79	810
4	Bulukarto	3 507	6.64	756
5	Wates	2 333	5.56	420
6	Bulurejo Wates	2 951	4.16	709
7	Tambah Rejo	4 182	4.93	848
8	Wonodadi	8 544	6.26	1 365
9	Gading Rejo	5 515	5.04	1 094
10	Tegal Sari	4 605	5.85	787
11	Tulung Agung	4 509	7.37	612
12	Jogjakarta	2 639	4.31	612
13	Kediri	2 409	3.34	721
14	Mataram	4 424	6.62	668
15	Wonosari	2 647	1.55	1 707
16	Klaten	1 354	1.01	1 340
17	Wates Timur	2 210	1.73	1 277
18	Wates Selatan	1 703	0.81	2 102
19	Gading Rejo Timur	1 585	1.26	1 257
20	Gading Rejo Utara	3 488	2.40	1 453
21	Tambah Rejo Barat	2 255	1.03	2 189
22	Jogjakarta Selatan	1 287	1.07	1 203
23	Wonodadi Utara	2 248	1.35	1 659
Jumlah		73 967	85,71	863

(Sumber: Proyeksi SP2010 Dan Data Pekon)

E. Kecamatan Ambarawa

Ambarawa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pringsewu, Lampung, Indonesia. Kecamatan Ambarawa berjarak kurang lebih 7 kilometer sebelah selatan dari pusat kabupaten Pringsewu. Kecamatan Ambarawa beribukota di Kota Ambarawa. Kecamatan Ambarawa merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan

Pringsewu pada 2006. Ambarawa masuk dalam klasifikasi Kota Kecil dengan jumlah penduduk sebesar 34.036 Jiwa (BPS Kabupaten Pringsewu 2016).

Ambarawa terkenal dengan sumber air yang bernama Air Krawang.

Batas wilayah Kecamatan Ambarawa:

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.
- Selatan berbatasan Dengan Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu.
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

Adapun luas Kecamatan, nama kepala pekon serta penduduk dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada table-tabel berikut:

Tabel 4.14 Luas Kecamatan Ambarawa menurut Pekon 2017

No	Pekon	Luas	
		Km2	Ha
1	Ambarawa	3,63	363
2	Ambarawa Barat	4,03	403
3	Margodadi	3,58	358
4	Jati Agung	2,98	298
5	Sumber Agung	3,65	365
6	Kresnomulyo	5,24	524
7	Tanjung Anom	3,40	340
8	Ambarawa Timur	4,50	450
Jumlah		31,00	3 100

(Sumber: Bagian Pemerintahan Pekon Sekretariat PEMDA Kab Pringsewu Diolah Oleh Peneliti)

Tabel 4.15 Luas Kecamatan Ambarawa Menurut Penggunaan Tanah 2017

No	Penggunaan Tanah	Luas(Ha)	Presentase
1	Persawahan	1 837	59,25
2	Ladang/Tegalan	145	4,68
3	Perkebunan Rakyat	105	3,39
4	Pekarangan	534	17,22
5	Kolam	26	0,84
6	Lahan Bukan Pertanian	453	14,61
Jumlah		3 100	100,00

(Sumber: UPT Pertanian Kecamatan Ambarawa)

Tabel 4.16 Tabel Nama Kepala Pekon dan Masa Jabatan di Kecamatan Ambarawa 2017

No	Pekon	Nama Kepala	Masa Jabatan
1	Ambarawa	Mas'ud	2011-2017
2	Ambarawa Barat	Sri Sutinah	2016-2022
3	Margodadi	Syamsudin	2012-2018
4	Jati Agung	Paryono	2016-2022
5	Sumber Agung	Ahmad Hajar	2012-2018
6	Kresnomulyo	Suroyo	2014-2020
7	Tanjung Anom	Muhyidin	2016-2022
8	Ambarawa Timur	Rohmat	2012-2018

(Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Ambarawa)

Tabel 4.17 Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Pekon di Kecamatan Ambarawa, 2017

No	Pekon	Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
1	Ambarawa	6 385	3,63	1 759
2	Ambarawa Barat	4 501	4,03	1 117
3	Margodadi	4 738	3,58	1 323
4	Jati Agung	3 180	2,98	1 067
5	Sumber Agung	5 927	3,65	1 624
6	Kresnomulyo	6 542	5,24	1 248
7	Tanjung Anom	2 116	3,40	622
8	Ambarawa Timur	1 203	4,50	267
Jumlah		34 592	31,00	9 027

(Sumber: Proyeksi SP2010 Diolah Oleh Peneliti)

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor penurunan partisipasi pemilih dari pilgub 2014 menuju pilgub 2018 adalah dapat dikarenakan faktor geografis, perbedaan momen pemilu, dan Pemilu Yang Penuh Ranah Kotor, Korup, dan Perebutan Korupsi Belaka. Faktor-faktor dari teori yang dipakai peneliti yang tidak terlalu mempengaruhi penurunan partisipasi pemilih adalah faktor administrasi, kepercayaan politik, etnis, dan pendidikan. Perinciannya adalah sebagai berikut:

B. Faktor Yang Mempengaruhi Turunnya Partisipasi Pemilih

1. Faktor Geografis

Banyaknya masyarakat yang sedang bekerja diluar daerah tempat ia berdomisili menyebabkan tidak dapatnya mengikuti kontestasi pilkada yang diselenggarakan. Waktu libur yang terbatas tidak memungkinkan masyarakat pulang sekedar menggunakan hak pilih dan biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit jika hanya menggunakan hak pilih. Kondisi geografis inilah umumnya

yang terjadi di tiap daerah pedesaan yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam pilkada.

2. Perbedaan Momen Pemilu

Perbedaan momen pemilah legislaif dan pemilihan gubernur memiliki dampak yang signifikan dalam partisipasi. Kedekatan emosional yang masyarakat alami dengan kandidat legislatif terutama pemilihan DPRD tingkat Kabupaten sangat berpengaruh untuk menggerakkan masyarakat turut dalam partisipasi pemilihan legislatif.

Pilkada yang diselenggarakan umumnya masyarakat tidak mengetahui perilaku, kapasitas, kredibilitas, serta rasa tanggung jawab yang dapat dipercaya terhadap sosok kandidat pilkada yang mencalonkan diri dalam kontestasi, dan jarang juga ia tampil dalam masyarakat luas yang menyebabkan masyarakat tidak mengenal kandidat tersebut. Hal yang demikian dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kontestasi pilkada.

3. Pemilu Yang Penuh Ranah Kotor, Korup, dan Perebutan Korupsi Belaka

Tidak turutnya masyarakat dalam partisipasi pemilih dapat disebabkan faktor korupsi ataupun politik sekarang banyak yang hanya menguntungkan individu atau sebagian kelompok tertentu. Jabatan eksekutif yang hanya diperuntungkan untuk perubutan kursi belaka guna mencapai suatu tujuan pribadi ataupun kelompok tertentu. Masyarakat yang tidak puas dengan

kepemimpinan yang silih beganti dikarenakan tidak membawa perubahan yang signifikan menyebabkan engganya dalam berpartisipasi dalam pemilu yang diadakan selanjutnya, akhirnya penurunan partisipasi dialami dalam gelanggang pemilihan akibat faktor kekecewaan tersebut.

C. Faktor Yang Tidak Mempengaruhi Turunnya Partisipasi Pemilih

1. Administrasi

Pendataan yang akurat lagi optimal yang dilakukan aparat penyelenggara pemilu membawa hasil banyaknya masyarakat yang terdaftar sebagai anggota pemilih, sehingga masyarakat tidak perlu untuk mengurus masalah pendataan pemilih kepada komisi penyelenggara pemilu, dimana terkadang ada masyarakat jika ia tidak terdata sebagai daftar pemilih ia malas atau tidak mau repot untuk mengurusnya yang demikian itu dapat menyebabkan penurunan partisipasi pemilih.

2. Kepercayaan Politik

Kepercayaan masyarakat terhadap isu-isu dan visi misi yang diberikan banyak juga menggugah masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilihan, sehingga masyarakat yang terdaftar menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. Rasa simpati masyarakat terhadap kandidat dapat dikarenakan adanya janji infrastruktur atau janji-janji lainnya dari kandidat yang mengkampanyekan diri, dari hal tersebut timbul keinginan berpartisipasi.

Adanya visi misi dan janji-janji yang diberikan tidak menjadikan masyarakat apatis berpartisipasi begitu saja, dikarenakan banyaknya para pejabat eksekutif yang mengobrolkan janji tatkala kampanye tidak ditunaikan janjinya tatkala mendapatkan jabatan tersebut. Sehingga ketika ia menduduki jabatan tersebut ia lupa akan janji-janjinya yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kandidat tidak ada lagi, yang dapat berakibat menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap setiap kandidat yang mengkampanyekan diri.

3. Pendidikan

Masyarakat yang berpendidikan umumnya dapat dikatakan banyak yang peduli terhadap pilkada, sehingga ada yang berasumsi bahwa tingginya tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap keikutsertaan dalam pemilihan. Kecamatan Ambarawa dan Gading Rejo umumnya banyak yang berpendidikan, sehingga kesadaran politiknya dapat dikatakan tinggi jika untuk momen pemilihan kepala daerah.

4. Etnis

Fanatik kesukuan adalah suatu yang dapat merugikan jika direalisasikan pada porsi yang tidak pada tempatnya. Keterikatan kesukuan dalam pilkada dapat terjadi dalam momen memilih, dikarenakan kandidat tidak ada yang sesuku dengannya, maka ia apatis terhadap pemilihan. Responden yang diteliti di Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa banyak yang mengungkapkan bahwa

faktor etnis tidak berpengaruh terhadap momen pemilihan, sehingga partisipasi yang rendah terhadap momen pilkada tidak dapat diteliti pada faktor etnis.

D. Saran

KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pilkada sebagaimana antusiasnya terhadap pemilihan legislatif, karena pejabat eksekutif yang terpilih dalam pilkada banyak memberikan kontribusi dalam kebijakan-kebijakan pembangun disuatu daerah, sehingga jika ada kandidiat yang membawa mashlahat yang baik bagi masyarakat sudah selayaknya masyarakat berpartisipasi dalam kontestasi pilkada tersebut.

KPU juga lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui pendidikan politik bahwa kandidat terpilih dalam pilkada tersebut akan memimpinya dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga jika masyarakat terus apatis padahal masih terbuka alternatif yang besar untuk memilih kandididat yang lebih baik dalam kepemimpinan, maka selayaknya bagi masyarakat memberikan suara dalam pilkada tersebut guna memilih kepala daerah yang lebih berkualitas.

Pendidikan politik yang diberikan oleh KPU sedikit banyak akan berdampak mempengaruhi masyarakat peduli terhadap pemilu maupun pilkada, dengan pengajaran ataupun pendidikan kepada masyarakat bahwa akibat dari pilkada yang diselenggarakan ini akan menentukan kepemimpinan yang memimpin daerahnya dalam kurun waktu lima tahun kedepan kelak.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik (Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik)*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ali, Novel dkk. 2003. *Pilkada Di Era Otonomi*. Aneka Ilmu. Semarang.
- Amirudin. 2006, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Arifin. Anwar. 2014. *Politik Pencitraan Pencitraan Politik*. PT Graha Ilmu. Yogyakarta.
- _____. 2014. *Perspektif Ilmu Politik*. Pustaka Indonesia. Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Efriza. 2012. *Political Eksplore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung. Alfabeta.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, analisis data*. PT. Raja Grafindo, cet 4. Jakarta.
- Hendratno, Edie Toet. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Huntington, Samuel P, dan Nelson Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta Jakarta.

- Irham, Muhammad Aqil. 2016. *Demokrasi Muka Dua (Membaca Ulang Pilkada Di Indonesia)*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Jakarta.
- Jurdi, Fatahullah. 2014. *Studi Ilmu Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Matthew B Miles & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Raco J R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan*. PT Grasindo. Cikarang.
- Redjo, Sumagyo Ibnu. 2014. *Sistem Politik dan Kepartaian Di Indonesia*. Dian cipta. Bandung.
- Sangadji, Etta mamang dan Sophia. 2010. *Metode Penelitian*. Andi. Yogyakarta.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sastroatmojo, Sudijono. 1995. *Perilaku politik*. IKIP Semarang Press 18. Semarang.
- Sinaga, Rudi Salam. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sitepu, P Anthonius. 2012. *Teori-teori Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiyono, dan R&d. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta, cet- 20. Bandung.

Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Politik*. Rineka Cipta. Jakarta.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Jurnal

Bachtiar, Faradhiba Rahman. 2014. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*. Jurnal Politik Profetik. Vol 3, No, Hal: 1-17.

Fitriah, Elis Anisah. 2014. dengan *Personal Values dan Internal Political Efficacy Terhadap Patisipasi Politik Mahasiswa Pemilih Pemula*. Jurnal Ilmiah Psikologi Vol. 1, No.2, Hal: 244–254.

Hadiawan, Agus. 2009 *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung. Jurnal Vol 3, No 7. Hal 634-643.

Hasugian, Andi Saputra. 2017. *Perilaku Tidak Memilih Masyarakat Desa Di Kecamatan Mandau Dalam Pilkada Kabupaten Bengkalis Tahun 2015*. JOM FISIP Vol. 4 No 1, Hal 1-15.

Hendrik, Doni. 2010. *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008*. Jurnal Demokrasi Vol. IX No. 2. Hal 137-148.

Herdiyanto. Suharso, Budiharto 2016. *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/ 2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)*. Jurnal Vol 12 No. 1. Hal 204-221.

Soehandry, Elwy S. 2017. *Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umumdi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2015*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 4 No. 1. Hal 1-14.

Ramli, Muhammad. 2013. *Partisipasi Masyarakat Desa Kedundung Kecamatan Labuan Amas Utara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Tahun 2010*. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan. Lokal Vol II Edisi 2. Hal 320-327.

Skripsi

Muslimah, Siti. 2016. *Evaluasi Strategi Penyelenggara Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah 2015 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Way Kanan)*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila.

Sundari, Fitri Wulan. 2017. *Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan di Kecamatan Pangkalan*

Kerinci Tahun 2015. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau. Hal 1-15.

Yasa, Ahclak Asmara. 2018. *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 di kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Website

<http://lampung.tribunnews.com/2014/01/13/dpt-pilgub-lampung-5868304-mata-pilih>

diakses pada Hari Selasa, 16 Oktober, Pukul 12.37 WIB.

<https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/rekap/t1/lampung> diakses pada Hari

Selasa, 16 Oktober, Pukul 12.40 WIB.

Sumber Data

Daftar Kabupaten/Kota Pemilih Pada Pilgub 2014 KPU Provinsi Lampung 2014

Daftar Kabupaten/Kota Pemilih Pada Pilgub 2014 KPU Provinsi Lampung 2018

Daftar Pasangan Kandidat Pilgub 2014 Serta Partai Pengusung KPU

ProvinsiLampung 2014

Daftar Pasangan Kandidat Pilgub 2014 Serta Partai Pengusung KPU

ProvinsiLampung 2018

Daftar Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah 2014 Seluruh

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung KPU Provinsi Lampung

Daftar Hasil Rekapitulasi Partisipasi Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018 Seluruh

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Daftar Partisipasi Pemilih Per-Kecamatan Kabupaten Pringsewu Pada Pilgub 2014

KPUD Kabupaten Pringsewu

Daftar Partisipasi Pemilih Per-Kecamatan Kabupaten Pringsewu Pada Pilgub 2018

KPUD Kabupaten Pringsewu